

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. *Sustainability Report*

Menurut (ARTAMEVIAH, 2022), laporan keberlanjutan tidak hanya memaparkan kinerja keuangan suatu bisnis, tetapi juga membahas fakta non-keuangan, seperti inisiatif sosial dan lingkungan perusahaan, yang memungkinkan perusahaan untuk bertahan dalam jangka panjang. Sementara itu, (Arif, 2015) mendefinisikan laporan keberlanjutan sebagai laporan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan sebagai alat ukur yang mengungkapkan dan menunjukkan upaya perusahaan untuk bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan guna mencapai tujuan kinerja perusahaan untuk pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan adalah proses memaksimalkan sumber daya alam yang ada. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang mengatur lingkungan hidup, mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya perusahaan yang disengaja dan terencana untuk memasukkan isu lingkungan, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pertumbuhannya dengan tujuan menjamin keberlanjutan dan keamanan lingkungan. Laporan keberlanjutan adalah laporan yang dibuat oleh bisnis atau lembaga yang sering kali memuat informasi tentang kinerja perusahaan dalam tiga bidang utama yang harus diperiksa dan dipelihara: lingkungan, sosial, dan ekonomi. Laporan ini juga menjelaskan bagaimana organisasi memenuhi tugasnya di ketiga area tersebut. Laporan ini juga membahas dampak positif dan negatif perusahaan terhadap kehidupan masyarakat lokal (sosial) dan lingkungan. Oleh karena itu, organisasi harus mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan informasi keberlanjutan mereka kepada seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal melalui laporan keberlanjutan.

Laporan keberlanjutan ini sangat penting dan sangat bermanfaat bagi perusahaan karena:

- 1) Laporan ini yang akan memberikan informasi bagaimana suatu perusahaan memberikan dampak sosial, lingkungan dan ekonomi dari kegiatan perusahaan itu sendiri.
- 2) Laporan ini juga akan membuat para pemangku kepentingan, meningkatkan transparansi terhadap para pemegang saham serta kepercayaan, dan juga
- 3) Membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat di dalam perusahaan.
- 4) Meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi.
- 5) Meningkatnya persaingan, di mana organisasi yang melaporkan keberlanjutannya secara lebih berkala akan menunjukkan kinerja yang lebih andal dibandingkan organisasi lain, yang dapat menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang.
- 6) Meningkatkan reputasi, ketika perusahaan tersebut tekun memberikan laporan keberlanjutannya maka komitmen terhadap isu-isu lingkungan dan sosial dapat meningkatkan citra positif perusahaan dan akan berdampak terhadap penarikan investor agar berinvestasi ke dalam perusahaan tersebut.

Selain itu perusahaan juga sangat penting untuk melakukan audit independen terhadap data yang dilaporkan untuk memastikan kebenaran dari laporan tersebut untuk meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan atas laporan keberlanjutan yang dibuat oleh perusahaan.

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan platform yang dimanfaatkan oleh banyak perusahaan untuk menawarkan pasar modal kepada dunia industri pada tahap awal. Tugas dan kewajiban BEI, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, mencakup memastikan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. BEI mematuhi peraturan yang jelas dan konsisten dalam menjalankan transaksi. Oleh sebab itu banyak perusahaan yang mendaftarkan diri ke BEI karena dapat memperluas akses pencarian pasar modal, menarik investor bahkan memengaruhi pendanaan. Ketika perusahaan mendaftar ke BEI, perusahaan harus mempersiapkan serangkaian syarat yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut sudah ditetapkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BEI.

2.1.2. Teori Keberlanjutan

Teori keberlanjutan ini dikenal sebagai konsep modern yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan bersifat jangka panjang yang dikembangkan dengan manajemen sumber daya alam, sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk menjaga lingkungan alam dan makhluk hidup sekitarnya. Pembangunan keberlanjutan menjadi perhatian dunia untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan sumber daya yang akan diserahkan kepada generasi mendatang (Law, 2009). Konsep ini pertama kali diperkenalkan ke publik pada pertengahan tahun 1980-an. Keberadaan konsep pembangunan berkelanjutan membantu perkembangan dalam dunia literasi terkait konsep lingkungan pada era 1960-1980-an (Robinson. J. 2004:370). Dengan adanya pertimbangan terkait pembangunan keberlanjutan, pihak pemangku keputusan bertanggung jawab dalam membuat keputusan yang berdampak pada keseimbangan alam, kebutuhan masyarakat serta kepentingan bisnis (Christopher O'brien, 1999).

2.2. Korporasi Keberlanjutan/ Sustainability Bussiness Teori

Korporatisme berkelanjutan adalah filosofi perusahaan yang bertujuan menciptakan manfaat jangka panjang bagi perusahaan, lingkungan, dan masyarakat. Gagasan ini menyoroti perlunya mempertimbangkan implikasi sosial, lingkungan, dan ekonomi dalam membuat keputusan bisnis, alih-alih hanya mementingkan kepentingan pribadi. Konsep ini memiliki tujuan, yaitu:

- 1) Menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi perusahaan, lingkungan, sosial dan masyarakat.
- 2) Meningkatkan reputasi atau citra perusahaan dan dapat menarik investor yang peduli dengan keberlanjutan.
- 3) Mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan tanggap terhadap perubahan.

Berdasarkan sudut pandang keberlanjutan masa kini, terdapat tiga dimensi yang menjadi pertimbangan: Sosial, Ekonomi, dan lingkungan. (Elkington, 2013) mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan memiliki analogi utama yang mendasari ekonomi, sosial, dan lingkungan berupa analogi *TRIPLE-BOTTOM LINE*. Adapun analogi yang digunakan dalam konsep ini adalah:

- 1) Menjelaskan bagaimana pembangunan berkelanjutan lingkungan akan memberikan dampak bagi perkembangan perekonomian perusahaan.
- 2) Menjelaskan bagaimana keberlanjutan ekonomi akan memberikan dampak bagi keberlanjutan sosial dimana perusahaan akan menentukan strategi yang menganalisa sisi ekonomi dan sosial.
- 3) Menjelaskan bagaimana keberlanjutan sosial dan ekonomi akan memberikan dampak bagi lingkungan dimana akan menghasilkan *eco-effectiveness*.

Dari beberapa analogi di atas maka dapat diambil 3 elemen yang sangat penting dalam mendukung keberlanjutan dan menjadi alat ukur kesuksesan bagi perusahaan, yaitu:

- 1) *Profit*: Merupakan aspek ekonomi atau keuangan tradisional, yang mencakup keuntungan, pendapatan dan pertumbuhan bisnis. Profit dalam *Triple Bottom Line* bukan hanya tentang menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga tentang memastikan bahwa keuntungan tersebut dihasilkan secara etis dan berkelanjutan, dengan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. TBL menekankan bahwa perusahaan harus mengukur keberhasilan mereka tidak hanya berdasarkan keuntungan finansial, tetapi juga berdasarkan dampak positif yang mereka berikan kepada masyarakat (*people*) dan lingkungan (*planet*).
- 2) *People*: Istilah "orang" mengacu pada bagian penting dari keberlanjutan perusahaan, termasuk aspek sosial dan pengaruh perusahaan terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk pekerja, konsumen, masyarakat, dan generasi mendatang.
- 3) *Planet*: Terkait isu lingkungan, termasuk pengaruh aktivitas perusahaan terhadap ekosistem dan keberlanjutan alam, TBL mewajibkan perusahaan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari operasi mereka, termasuk penggunaan sumber daya alam, emisi gas rumah kaca, polusi, dan pengelolaan limbah. TBL juga menyoroti pentingnya menjaga aspek ini, yang akan berdampak besar pada kehidupan di masa depan, seperti perlindungan keanekaragaman hayati, pemanfaatan energi terbarukan, dan pengurangan jejak karbon. Perusahaan juga diwajibkan untuk menerapkan praktik berkelanjutan dan bertanggung jawab secara ekologis, seperti mengurangi polusi, meningkatkan efisiensi energi, dan menerapkan konsep ekonomi sirkular.

2.3. Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR adalah konsep yang menuntut pertanggungjawaban perusahaan atas dampak sosial dan lingkungan dari operasinya. Hal ini lebih dari sekadar keuntungan; CSR juga memperhatikan kepentingan pelanggan, pekerja, pemegang saham, masyarakat, dan lingkungan. Di Indonesia, CSR diatur oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah (PP No. 47 Tahun 2012). CSR bermanfaat untuk:

- 1) Meningkatkan citra perusahaan dan reputasi perusahaan di mata masyarakat
- 2) Meningkatkan keberlanjutan bisnis baik dari segi ekonomi, lingkungan dan sosial
- 3) Meningkatkan keterlibatan karyawan yang akan membuat karyawan termotivasi dan bangga bekerja di dalam perusahaan.

2.4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Menurut Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) adalah peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, POJK ini mengikat secara hukum dan berlaku secara luas. POJK Nomor 51/POJK.03/2017 adalah salah satu tujuan utama OJK. OJK bertujuan untuk membuat keuangan lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyetujui Peraturan No. 51/POJK.02/2017, yang membahas penerapan keuangan berkelanjutan untuk lembaga keuangan, penerbit, dan entitas publik. Aturan tersebut mendefinisikan keuangan berkelanjutan sebagai dukungan menyeluruh sektor jasa keuangan untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hal ini dicapai dengan menangani masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan. Anez Yuniar Pradini mengeksplorasi ekosistem keuangan berkelanjutan dalam kaitannya dengan POJK No. 51, sementara studi lain melihat bagaimana konsep keuangan berkelanjutan diterapkan di lembaga-lembaga Indonesia. OJK juga telah

mengamanatkan bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan di Indonesia mematuhi Standar GRI (Daromes et al., 2023).

2.4.1. Aspek Pengungkapan Sustainability menurut standar POJK

Tabel 2. 1. Aspek Pengungkapan Sustainability menurut standar POJK

Keterangan	Kode	
Penjelasan strategi berkelanjutan	A.1	Sosial
Ikhtisar kinerja aspek ekonomi	B.1a	Ekonomi
	B.1b	
	B.1c	
	B.1d	
	B.1e	
Ikhtisar kinerja aspek lingkungan hidup	B.2a	Lingkungan
	B.2b	Lingkungan
	B.2c	Lingkungan
	B.2d	Lingkungan
Ikhtisar kinerja aspek sosial	B.3	Sosial
Profil Singkat Emiten	C.1	Ekonomi
	C.2	
	C.3a	
	C.3b	Sosial
	C.3c	Ekonomi
	C.3d	Sosial
	C.4	Ekonomi
	C.5	Sosial
	C.6	Ekonomi

Keterangan	Kode	
Penjelasan Direksi	D.1a(1)	Ekonomi
	D.1a(2)	
	D.1a(3)	
	D.1a(4)	
	D.1a(5)	
	D.1b(1)	
	D.1b(2)	
	D.1c(1)	
	D.1c(2)	
	D.1c(3)	
Tata Kelola Keberlanjutan	E.1	Ekonomi
	E.2	Ekonomi
	E.3a	Ekonomi
	E.3b	Ekonomi
	E.4a	Ekonomi
	E.4b	Ekonomi
	E.5	Ekonomi
Kinerja Keberlanjutan	F.1	Ekonomi
	F.2	Ekonomi
	F.3	Ekonomi
	F.4	Ekonomi
	F.5	Lingkungan
	F.6	Lingkungan
	F.7	Lingkungan
	F.8	Lingkungan
	F.9	Lingkungan
	F.10	Lingkungan
	F.11	Lingkungan

	F.12	Lingkungan
	F.13	Lingkungan
	F.14	Lingkungan
	F.15	Lingkungan
	F.16	Lingkungan
	F.17	Sosial
	F.18	Sosial
	F.19	Sosial
	F.20	Sosial
	F.21	Sosial
	F.22	Sosial
	F.23	Sosial
	F.24	Sosial
	F.25	Sosial
	F.26	Sosial
	F.27	Sosial
	F.28	Ekonomi
	F.29	Ekonomi
	F.30	Ekonomi
Lain-lain	G.1	Sosial
	G.2	Sosial
	G.3	Sosial
	G.4	Ekonomi

Sumber: OJK 2017

2.5. Good Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) adalah seperangkat praktik untuk mengatur dan mengelola bisnis agar dapat memberikan nilai kepada para pemangku kepentingan (Maretha & Purwaningsih, 2013). Sementara itu, (Maretha & Purwaningsih, 2013) mendefinisikan GCG sebagai seperangkat hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS) untuk memberikan nilai tambah jangka panjang kepada pemegang saham dengan tetap

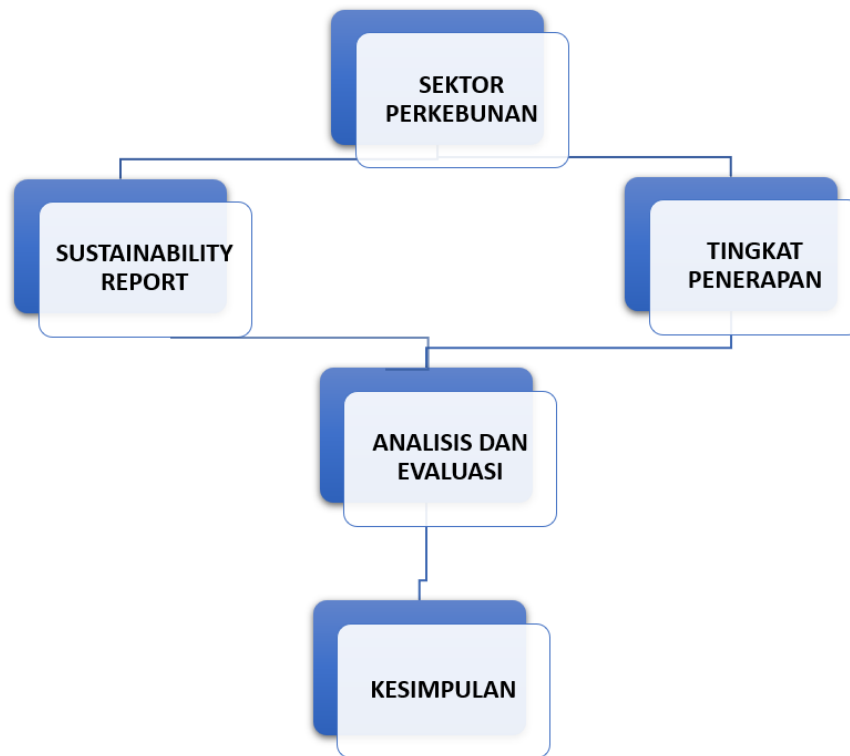
memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan standar yang berlaku. Definisi umum GCG adalah kerangka kerja yang mengendalikan interaksi antara manajemen, direktur, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. GCG mencakup prinsip-prinsip berikut (<https://e-journal.uajy.ac.id/10338/3/2EA19588.pdf>).

- 1) Transparansi: Informasi yang relevan harus tersedia dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang
- 2) Akuntabilitas: Direksi dan manajemen bertanggung jawab atas kinerja dan keputusan yang diambil
- 3) Responsibilitas: Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap dampak kegiatan bisnisnya terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 4) Independensi: Organ perusahaan harus bebas dari pengaruh pihak lain yang mengganggu kinerja perusahaan.
- 5) Kewajaran: Perusahaan harus bertindak adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.6. Kerangka Berpikir

Studi ini berfokus pada perusahaan-perusahaan di subsektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024. Penelitian ini berfokus pada dua isu utama: adopsi pelaporan keberlanjutan dan tingkat implementasinya. Analisis pelaporan keberlanjutan akan mengkaji tiga aspek utama: lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ketiga aspek ini merupakan inti dari pelaporan keberlanjutan.

Penelitian dan evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh dengan mematuhi standar yang berlaku, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana perusahaan-perusahaan di subsektor perkebunan menangani pelaporan keberlanjutan. Temuan studi dan penilaian ini akan menjadi dasar untuk menghasilkan kesimpulan tentang implementasi pelaporan keberlanjutan di perusahaan-perusahaan yang dianalisis.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Sumber: Data diolah penulis